

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM POLITIK BIROKRASI PARIWISATA

Andi Moh. Rifiyan Arief

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract: Community Empowerment in Politics Bureaucracy of Tourism. Community empowerment in tourism activities is the expansion of freedom of choice and action on sustainable development of economic sectors. This freedom is very limited for the common people and also the poor because of their inability to convey their aspiration. This opportunity of powerlessness becomes even greater if their chance to governmental access, tourism market, and traditions of society have been undermined by the big investors' interest. On this consideration, a small community needs empowerment, both in the individual and collective level of the tourism sector. Doing empowerment of small communities is tantamount to demanding efforts of eliminating the cause of the inability and improve the quality of life through revolving capital assistance, development tourism infrastructure aid, development of local tourism associations, strengthening partnerships of the tourism creative industries, and the facilitation of continuous assistance.

Abstrak: Pemberdayaan Masyarakat dalam Politik Birokrasi Pariwisata. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan merupakan perluasan kebebasan memilih dan bertindak pada pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan. Kebebasan ini sangat terbatas bagi masyarakat kecil dan miskin karena ketidakmampuan mereka untuk bersuara. Peluang ketidakberdayaan menjadi semakin besar jika kesempatan akses terhadap negara, pasar pariwisata, dan tradisi masyarakat dilemahkan oleh kepentingan investor besar. Mengenai hal ini, masyarakat kecil membutuhkan keberdayaan, baik di tingkat individu dan kolektif di sektor pariwisata ini. Memberdayakan masyarakat kecil sama artinya dengan menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan dan meningkatkan kualitas hidup melalui bantuan modal bergulir, bantuan pembangunan prasarana pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata lokal, penguatan kemitraan usaha kreatif sektor pariwisata, dan fasilitasi pendampingan berkesinambungan.

Kata Kunci: pemberdayaan masyarakat, politik birokrasi, pariwisata

PENDAHULUAN

Tulisan ini ingin memberikan argumentasi mengenai perlunya perubahan dan pemberdayaan masyarakat secara struktural di tengah persaingan korporasi ekonomi. Permasalahan dikaji melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan *kepolitikan birokratis* dan pendekatan *dependensia*. Pendekatan *kepolitikan birokratis* menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata tidak hanya merupakan tanggung jawab dari pelaksanaan peran pemerintah sebagai aktor negara dan pemelihara sektor publik. Namun secara lebih jauh, pendekatan ini menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat sebagai *stakeholder* utama dalam konsep pemberdayaan. Masyarakat yang akan diberdayakan adalah inisiator, pelaku, pengontrol, sekaligus penikmat utama dalam konsep pemberdayaan yang dilakukan terhadapnya. Masyarakat juga dapat melakukan haknya dalam advokasi jika terjadi ketidaksesuaian konsep

pemberdayaan yang dilakukan di lingkungan lingkungannya.

Adapun pendekatan *dependensia* digunakan untuk melihat ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh kuatnya ketergantungan negara atau daerah kepada investasi swasta berskala nasional dan internasional. Tingginya investasi diterima sebagai indikasi pertumbuhan ekonomi yang berhasil. Hal inilah yang diindikasikan menyebabkan tumbuhnya kebijakan bermuka dua, yang diterapkan dengan dalih kesejahteraan rakyat, tetapi justru mencekik industri lokalnya dengan belitan gurita industri pariwisata besar.

Pemerintah diindikasikan cenderung menerapkan konsep pembangunan ekonomi yang tergantung pada minat investor besar untuk membuka ladang industri besar di wilayahnya dibandingkan dengan membimbing masyarakat setempat belajar berkorporasi untuk kesejahteraannya sendiri. Minimnya dana anggaran,

seringkali menjadi alasan klasik. Masyarakat terus diajarkan untuk menjadi buruh yang baik daripada berkembang menjadi pengusaha mandiri di tanah sendiri. Lantas, bagaimanakah cara negara dapat menjamin kewibawaannya jika politik birokrasi Indonesia terus tunduk pada kepentingan kapitalis?

Dalam beberapa tahun terakhir ini, isu kebijakan negara tentang pariwisata telah banyak dikaji di berbagai negara dalam hal proses implementasi pada institusi (seperti, Pforr, 2006; Kruger 2004; Konig, 1998), tataran evaluasi pada relevansinya dengan masyarakat dan globalisasi (lihat, Levin, 2001; Atkinson dan Coleman, 1992) maupun tataran evaluasi mengenai kontribusinya pada pembangunan pariwisata dan lain sebagainya (misalnya, Bousset, dkk, 2007; Zhang, Chong, dan Ap, 1999). Pendekatan kepolitikan birokratik dan pendekatan teori ketergantungan digunakan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang masih tidak berdaya.

Dalam bentuknya yang asli, pendekatan kepolitikan birokratik dan pendekatan teori ketergantungan melihat keterbelakangan masyarakat yang berada di bawah kontrol kelas-kelas penguasa ekonomi, birokrat arogan, dan kapitalis asing yang sangat membatasi kesempatan mereka untuk tumbuh menjadi pengusaha kecil dan menengah nasional yang mandiri. Termasuk di dalamnya adalah para gelandangan, pengemis, hingga pedagang asongan yang ada di obyek-obyek wisata.

Penyebab keterbelakangan kondisi pemberdayaan masyarakat di Indonesia kurang lebih sesuai dengan gambaran dari lemahnya akses masyarakat terhadap kekuatan politik, serta tekanan birokrasi yang berlebihan dan cenderung menghambat sifat kritis dan kreatifitas. Karakter suka menerobos dan nepotisme masih kuat melekat dalam sistem birokrasi, meskipun upaya perbaikan melalui transparansi kinerja dan pelayanan mulai digalakkan oleh pemerintah pusat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset pustaka dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data

penelitian. Riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut riset pustaka atau sering juga disebut studi pustaka, ialah rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Retorika Pemberdayaan Masyarakat dalam Politik Birokrasi

Pendekatan birokrasi pada bidang ekonomi menempatkan tekanan bukan pada permasalahan politik, melainkan pada cara memberdayakan masyarakat, khususnya sektor pariwisata sudah diatur berdasarkan konsep modern. Pemberdayaan masyarakat adalah sistem ekonomi partisipatif yang memberikan akses sebesar-besarnya secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dalam proses produksi, distribusi, konsumsi nasional, peningkatan kapasitas maupun dalam suatu mekanisme penyelenggaraan yang senantiasa memperhatikan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai pendukung kehidupan guna mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Berbagai model pemberdayaan masyarakat dalam kepolitikan birokratik diterapkan. Kelompok penguasa menjamin kekuasaannya dengan cara mendistribusikan peluang-peluang ekonomi yang dimonopoli oleh elit politik birokrat dengan akibat mandulnya kelompok-kelompok ekonomi mandiri yang tidak dapat tumbuh secara mandiri. Malahan kelompok bisnis sering dipaksa untuk mengikatkan diri pada birokrat-birokrat tertentu dengan maksud untuk menjalin kemudahan usaha.

Sebagai negara yang pernah dijajah selama 3,5 abad, perekonomian Indonesia terbangun dari struktur ekonomi yang bercorak kolonial. Berdasarkan sebab itu, pemberdayaan ekonomi rakyat pertama-tama harus dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengoreksi struktur

pemberdayaan ekonomi yang bercorak kolonial tersebut. Kedua, liberalisasi di Indonesia bukan hal yang baru, tetapi telah berlangsung sejak kolonialis berkuasa. Menurut teori ketergantungan, keterbelakangan merupakan hasil dari imperialisme, Imperialisme Barat seperti halnya VOC. Hingga sekarang, sistem pemberdayaan ekonomi rakyat pun tidak pernah berhasil diselenggarakan di Indonesia.

Perjalanan perekonomian Indonesia selama 70 tahun justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme. Proses transisi dari ekonomi subsistem, kapitalisme, sosialisme, dan globalisasi itulah, antara lain yang menjelaskan semakin terperosok perekonomian Indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda-agenda ekonomi neoliberal. Bahkan, hutang dalam dan luar negeri pemerintah selalu meningkat dari masa ke masa. Di masa Soekarno, jumlah hutang ini mencapai US\$3,4 milyar, lalu meningkat menjadi US\$ 53 milyar plus tambahan dana BLBI hingga mencapai total US\$ 171 milyar pada masa Soeharto.

Hutang ini terus meningkat di zama Habibie dengan total US\$ 178 milyar, tetapi dibarengi dengan prestasi penurunan nilai dolar hingga Rp. 7.000,00. Pada zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid, peningkatan hutang Indonesia berada di angka US\$ 157 milyar, lalu menjadi Rp. 1.299,5 triliun dan meningkat menjadi Rp. 2.532 triliun di zaman Susilo Bambang Yudoyono. Hutang ini terus melonjak hingga US\$ 304,6 miliar dalam bulan November 2015.

Hal ini menunjukkan arti bahwa Indonesia semakin tergantung. Amanat konstitusi untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat masih tertahan sebagai khayalan anak bangsa. Gambaran bangsa masih menunjukkan kemiskinan, pendidikan rendah, investasi rendah, teknologi rendah, penghasilan rendah, pengangguran dan setengah pengangguran banyak, eksploitasi diri dengan kerja keras akan tetapi hasilnya kecil.

Kelemahan posisi tawar bangsa Indonesia menjadi semakin nyata tatkala harus dihadapkan pada tekanan kepentingan kaum kapitalis sebagai dampak timbunan hutang yang membelit. Sebagai contoh adalah semakin terbukanya

peraturan perundangan mengenai sumber daya alam yang terbuka untuk campur tangan investor asing di dalamnya. Di antara peraturan perundangan tersebut adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 mengenai BUMN, dan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Dalam klausul pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang tersebut memuat dibolehkannya investor luar negeri menanamkan modal. Indikasi liberalisasi juga terlihat dari diperkenalkannya investor swasta menanamkan modal di beberapa sektor pengelolaan sumber daya alam yang difasilitasi menjadi 95% modal saham tanpa menilik status kewarganegaraannya.

Argumentasi yang diberikan Fakhri (2006) tentang ketergantungan Indonesia di sektor pariwisata dijelaskan sebagai membanjirnya investasi asing dalam berbagai aspek industri pariwisata. Hal ini merupakan bentuk neokolonialisme klasik yang menyusup ke dalam industri pariwisata yang disangkanya sebagai penolong. Sementara industri kapitalis di sektor pariwisata bersifat padat modal ini harus bersaing dengan industri pariwisata domestik padat karya dan nyaris tidak efisien yang dikuasai oleh pribumi.

Kerusakan dialami oleh industri pariwisata domestik karena banjirnya barang-barang pariwisata impor dari luar dan modal asing (Damanik, Kusworo, dan Raharjana, 2005). Strategi pembangunan sektor pariwisata di Indonesia dewasa ini hanya mengharapkan bantuan luar negeri, jebakan utang yang tidak pernah akan terbayar (Suansri, 2003). Model kepolitikan birokratik bukan menumbuhkan pengusaha pariwisata lokal, akan tetapi justru memperkuat basis-basis kapital untuk sekedar memperoleh dukungan masyarakat lokal yang senang mendapat pekerjaan berupah yang sering disia-siakan bergengsi.

Peranan kaum borjuis (orang kaya baru) yang memainkan peranan sebagai junior partner bagi pemodal asing, telah memaksa kapitalisme berlaku di Indonesia. Kapitalis asing ini akhirnya bercokol dan mandiri di Indonesia. Nampaknya masa depan pemberdayaan masyarakat yang mandiri semakin suram.

Tahapan kritis inilah yang seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah. Proses pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan pembangunan sosial ekonomi yang riil dan wajib dijalankan secara benar daripada sekedar tataran formulasi kebijakan birokratis untuk menghabiskan anggaran. Negara sebagai penentu kebijakan birokrasi pariwisata Indonesia memiliki peranan yang sangat vital dan dipedomani oleh segenap rakyatnya. Jika tidak, maka akan menjadi sebuah kewajiban jika kemudian masyarakat cenderung mengkritisi kebijakan melalui demonstrasi, penolakan, atau bahkan resistensi terhadap kebijakan pembangunan pariwisata yang dianggapnya tak layak dan merugikannya (Dixon dan Dogan, 2002).

Faktor penyebab suramnya pemberdayaan masyarakat dapat diidentifikasi antara lain: (1) negara atau kebijakan pemerintah di sektor pariwisata kurang tepat; (2) pasar (akses modal atau pasar yang tidak adil); (3) masyarakat (tradisi atau budaya yang kurang baik). Bila kita cermati dari kesuraman ini, sekurang-kurangnya terdapat tiga azas yang mendasari pemberdayaan masyarakat menurut pembukaan UUD 1945.

Pertama, aspek pemerataan tidak hanya harus tampak pada kesempatan yang sama dalam berusaha, melainkan juga dalam sarana menggunakan kesempatan tersebut seperti modal, lahan ijin, keahlian, dan keterampilan, pasar, dan perlindungan hukum. *Kedua*, pemerataan tidak hanya tampak dari hasil-hasil pembangunan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, melainkan juga tampak pada partisipasi semua pihak dalam pembuatan keputusan ekonomi dan politik. *Prinsip untuk rakyat* hanya mungkin terwujud jika juga diterapkan berdasarkan *prinsip oleh rakyat*. *Ketiga*, pada tingkat individu warga negara berlaku tiga prinsip distribusi manfaat, yaitu (a) setiap orang menerima sesuai dengan kebutuhan dasarnya, (b) setiap orang menerima sesuai dengan hasil karyanya, (c) setiap orang menerima tanggung jawab sesuai dengan resiko yang dipikulnya. Akan tetapi, prinsip pemberdayaan masyarakat harus menolak prinsip setiap orang menerima sesuai dengan keinginannya ataupun prinsip orang menerima sesuai dengan apa saja yang dapat diambil dengan cara apa saja.

Sebenarnya banyak jenis kegiatan yang dapat dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa bantuan dan intervensi negara. Bahkan intervensi negara justru dapat mematikan prakarsa dan menghambat kreativitas masyarakat. Ciri khas pemberdayaan masyarakat menggunakan semua sumber daya daerah, misalnya, material bangunan berbasis lokal, atraksi lokal, asosiasi lokal, sumber pangan dan energi lokal, kearifan budaya dan tata adat lokal, serta sumber daya manusia lokal (Korten dan Klauss, 1984).

Pariwisata Itu Menjual Citra

Tidak ada maksud untuk mengecilkan niat Arswendo dan teman-temannya dalam memperjuangkan nasib masyarakat miskin. Akan tetapi menjual pariwisata itu adalah usaha jasa menjual citra dengan produk yang lebih banyak bersifat abstrak (Leiper, 2000). Kalau dicitrakan, ketidakberdayaan itu identik dengan kemiskinan. Atau secara definitif cenderung kepada makna kesusahan atau kesulitan. Hal ini tentunya akan berlawanan dengan kata wisata, yang kegiatan perjalanannya dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, untuk bersenang-senang menikmati objek dan daya tarik wisata. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa kata wisata dan ketidakberdayaan adalah dua kata yang tidak sejalan dalam menampilkan citranya. Dengan demikian, citra pariwisata yang dimunculkan tidak akan bersifat positif, tetapi bisa jadi justru menyurutkan minat wisatawan untuk bertandang.

Mencermati kata ketidakberdayaan itu sendiri relatif lekat dengan parameter rendahnya kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan alam. Fakta membuktikan bahwa rendahnya parameter tersebut mengakibatkan rentannya permasalahan wabah penyakit, kebodohan, kerusakan, dan kerusakan, seperti wabah kolera tahun 1991, pes tahun 1998, flu burung tahun 2003, Bom Bali 1 tahun 2002, Bom Bali 2 tahun 2007, tragedi Sampit tahun 2001, banjir tiap tahun di beberapa kota termasuk Jakarta, dan perang antarsuku yang sering menjadi tajuk berita. Serangkaian kejadian tersebut melekat pada citra ketidakberdayaan dan membuat beberapa negara akhirnya melarang warga negaranya berkunjung (*travel*

warning), sehingga berdampak pada turunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia.

Turunnya kunjungan wisatawan yang drastis ini memperburuk tingkat kehidupan masyarakat yang bersandar pada hasil ekonomi kegiatan pariwisata. Banyak usaha jasa industri pariwisata gulung tikar dan berimbas pada pemutusan hubungan kerja massal. Ketika banyak warga masyarakat banyak yang menjadi pengangguran, maka dikhawatirkan kriminalitas, tekanan sosial, dan perpecahan juga akan ikut meningkat. Kemiskinan meluas hingga berdampak ke desa-desa. Masyarakat menjadi semakin tak berdaya sebab tidak memiliki keahlian lain di luar pekerjaan biasanya. Ekonomi nasional dapat menjadi surut, bahkan bangkrut karenanya. Inilah *multiplier effect* negatif yang sangat ditakutkan oleh negara saat kapitalis besar mulai berulah untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan etika-etika bisnis yang berkesejahteraan sosial.

Berdasarkan asumsi ini, kiranya sangat layak dipertanyakan ketika kebijakan pengembangan pariwisata lebih cenderung mendukung upaya preservatif terhadap sumber daya pariwisata daripada usaha konservasi. Membuat masyarakat adat terpencil tetap lekat dalam keterbelakangan dan keterpencilannya bukanlah sebuah tindakan arif dan bijaksana. Tameng pelestarian sumber daya pariwisata sebagai usaha preservatif selayaknya tak boleh diterapkan secara membabi buta, apalagi terhadap sumber daya manusia sebagai pemangku budaya. Konservasi terhadap budaya itu perlu dilakukan, tetapi preservasi terhadap keterbelakangan dan kemiskinan adalah kejahatan kemanusiaan yang terstruktur dan sistematis. Kemiskinan itu justru kelemahan bukan suatu potensi. Kalaupun kemiskinan harus dipariwisatakan, maka selayaknya harus dipotensikan terlebih dahulu agar memenuhi syarat dijadikan objek dan daya tarik wisata melalui berbagai konsep pemberdayaan pariwisata yang berkerakyatan atau *pro poor tourism*.

Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata: Harapan dan Kenyataan

Namun, dalam banyak kasus, ketergantungan birokrat terhadap suapan kapitalis besar

masih dapat dijumpai dengan mudah, seperti pada kasus pengurusan IMB hotel tertentu (Yogyakarta), pembebasan lahan masyarakat untuk apartemen dan hunian eksklusif (Jakarta), manipulasi AMDAL untuk kepentingan industri (Kalimantan Selatan, Ende, dan Bandung), dan manipulasi hukum di kasus perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan tata ruang (Jakarta, Bandung, Bogor), serta beragam kasus penyalahgunaan kewenangan kebijakan lainnya untuk kepentingan investor besar.

Dalam kaitan ini, jika semua kata dirangkikan menjadi satu kesatuan makna, yaitu negara sebagai agen kebijakan pembangunan pariwisata yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan politik luar negeri yang bebas aktif adalah suatu kewenangan pemerintah sebagai perumus segala sesuatu yang harus dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan untuk membangun pariwisata dengan menempatkan rakyat sebagai pelaku ekonomi yang berdaulat yang mempunyai kebebasan kepentingan ekonomi di negara manapun. Oleh karenanya, jika dikaitkan dengan tujuan dari pembangunan pariwisata tersebut, maka selayaknya beragam kebijakan yang diambil harus memenuhi tuntutan sebagaimana berikut, antara lain: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemakmuran masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, melestarikan lingkungan hidup, mengembangkan kebudayaan, mempromosikan citra negara, memperkuat kesatuan negara, memperkuat identitas nasional, dan saling pengertian antara bangsa (UU No. 10 Tahun 2009, pasal 4). Tujuan ini tercapai bila kebijakan pembangunan pariwisata menghormati nilai-nilai agama, tradisi, budaya, kearifan lokal, hak asasi manusia, alam, kehidupan generasi berikutnya, perbedaan, persamaan hak untuk hidup, toleransi, ramah tamah, dan cinta damai. Aktivitas pariwisata di sini tidak sekedar mengejar ekonomi saja, sehingga tidak seharusnya ada judi, prostitusi, penggunaan obat-obat terlarang, kriminal, atau tempat maksiat.

Negara sebagai agen kebijakan pembangunan pariwisata yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan politik luar negeri bebas aktif ini di analisis secara sistematis melalui pendekatan Hall.

Menurut Hall (1994), kebijakan pembangunan pariwisata meliputi (1) tuntutan kebijakan dari dalam dan luar sistem politik di Indonesia; (2) keputusan kebijakan otoritas politik yang berwibawa; (3) output kebijakan; dan (4) dampak kebijakan yang tidak disengaja.

Meskipun berbagai kebijakan negara untuk memberdayakan masyarakat memainkan peranan penting, sejumlah peluang menunjukkan bahwa baik aktor negara maupun masyarakat dapat berpartisipasi aktif sebagai kemitraan yang mandiri. Konglomerasi menyebabkan struktur sosial yang bersifat materialis, memperlemah ekonomi negara, dan dominasi kongkalikong birokrat nasional dengan pemodal besar. Dalam menelusuri perkembangan pemberdayaan masyarakat di Indonesia, maka pemerintah harus melahirkan kebijakan baru untuk memperkuat kewibawaan negara maupun ekonomi masyarakat bawah.

SIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat di sektor pariwisata melalui pendekatan kepolitikan birokratis dan dependensia diolah berdasarkan prinsip oleh, dari, dan untuk rakyat merupakan salah satu titik tolak kajian pembangunan masyarakat pariwisata berkelanjutan. Kesepahaman mengenai konsep pemberdayaan masyarakat dalam penentuan kebijakan kepariwisataan menjadi agenda penting yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan pembangunan yang menyejahterakan. Pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu mengangkat derajat dari penonton menjadi pelaku, dari buruh menjadi pengusaha, maupun dari pesuruh menjadi majikan di tanah mereka sendiri. Terkait hal ini, perlu adanya koordinasi antarlembaga, agar kegiatan proyek pemberdayaan tidak saling tumpang tindih dan mirip satu sama yang lain dengan nama berbeda. Setiap lembaga negara boleh melakukan kegiatan pemberdayaan atas masyarakat sasaran yang sama, akan tetapi hasil akhirnya diharapkan memberikan kematangan ekonomi sosial serta jaminan kemerdekaan berwira-swasta bagi usaha pariwisata dan ekonomi kreatif setempat.

DAFTAR RUJUKAN

- Atkinson, M., dan W. Coleman, 1992, "Policy Networks, Policy Communities and the Problems of Governance", *Governance: An International Journal of Policy and Administration*, 5(1), hal. 154—180.
- Bousset, dkk., 2007, "A Decision Support System for Integrated Tourism Development: Rethinking Tourism Policies and Management Strategies", *Journal Tourism Geographies*, 9(4), hal. 387—404.
- Damanik, J., Kusworo, H.A., dan Raharjana, D.T. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Dixon, J. dan Dogan, R., 2002, "Hierarchies, Networks and Markets: Responses to Societal Governance Failure", *Theory & Praxis*, 24(1), hal. 175—196.
- Fakih, M. 2006. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Hall, M.C., 1994, *Tourism and Politics: Policy, Power, and Place*, London: Belhaven
- Konig, T., 1998, "Modelling Policy Networks", *Journal of Theoretical Politics*, 10(1), hal. 387—388.
- Korten, D.C. dan Klauss, R. (ed.) 1984. *People Centered Development : Contributions toward Theory and Planning Frameworks*. Kumarian Press.
- Kruger, H., 2004, "The Need For An Innovation-Oriented Tourism Policy", *Journal OECD*, hal. 1—3.
- Levin, S.J., 2001, "Public Policy, Community Colleges, and the Path to Globalization", *Journal Higher Education*, 42(2), hal. 237—262.
- Pfarr, C., 2006, "Tourism Policy in the Making An Australian Network Study", *Journal Annals of Tourism Research*, 33(1), hal. 87—108.
- Suansri, P. 2003. *Community Based Tourism*. Thailand: Rest Project.
- Zhang, Q.H., Chong, K., dan Ap, J. 1999. *An Analysis of Tourism Policy Development in Modern China*. *Journal Tourism Management* (20), 471—485.